



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS MULAWARMAN  
**SUB UNIT KERJA** : UNIVERSITAS MULAWARMAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ENCIK AKHMAD SYAIFUDIN
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
3. NHK : 672572

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 795.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/76 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 196 m2/18 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
4. Tanah Seluas 400 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. Tanah Seluas 2100 m2 di KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah Seluas 816 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 308.000.000**

1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, TOYOTA ETIOS1.2JM/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOTER Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOBIL, TOYOTA AVANCA VELOZ Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 249.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	75.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	214.340.738
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.392.340.738
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.392.340.738

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **15 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.